

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global dengan adanya teknologi informasi berupa internet sangat mendukung masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari – hari. Masyarakat tak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara. Masyarakat didorong agar secara mandiri dapat memanfaatkan internet dengan tujuan mendapatkan kebebasan beraktivitas dan berkreasi yang sempurna. Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara global.

Kebutuhan dan penggunaan terhadap teknologi informasi yang diaplikasikan dengan Internet dalam segala bidang seperti *e-banking*, *ecommerce*, *e-government*, *e-education* dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang berpengaruh dan wajar dalam kehidupan sehari – hari masyarakat. Perkembangan Internet semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik yang positif maupun dampak yang negatif. Tentunya untuk yang bersifat positif kita semua harus akui karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari perkembangan ini, misalnya untuk melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan menggunakan *e-banking*, *e-commerce* juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat dan waktu.

Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukan hal yang sulit dengan adanya *e-library*. Selain penggunaan teknologi sebagaimana disebutkan di atas masih terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi Internet juga membawa dampak negatif yang cukup banyak dalam penerapannya. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik secara online dengan resiko yang sangat kecil oleh individu maupun kelompok tertentu dengan tujuan menguntungkan baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Selain itu adalah akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara disamping menimbulkan kejahatan-kejahatan jenis baru. Kejahatan perbankan tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak di luar perbankan, tetapi juga melibatkan pihak-pihak di lingkungan perbankan sendiri. Banyak modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan ini, salah satunya pada usaha kartu kredit. Salah satu penyebabnya adalah pengawasan Bank Indonesia yang lemah terhadap bank-bank dan praktik kejahatan perbankan yang terus meningkat kuantitas dan kualitasnya dari waktu ke waktu, turut andil dalam melemahkan lembaga perbankan itu sendiri.

Kejahatan IT atau *Cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus dari operandi kejahatan ini sendiri serta tempat kejadian perkara (*locus delicti*) sehingga butuh penanganan

dan pengaturan khusus di luar KUHP.¹ Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya dimana kepolisian merupakan lembaga aparat penegak hukum yang memegang peranan penting di dalam penegakan hukum, sebab tanpa adanya hukum yang mengatur dan lembaga yang menegakkan maka dapat menimbulkan kekacauan didalam perkembangannya seiring dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit di Indonesia.²

Credit card Fraud adalah suatu bentuk kejahatan dimana seseorang menggunakan kartu kredit milik orang lain secara melawan hukum bertransaksi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik kartu kredit tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.³ Terjadinya *credit card fraud* adalah ketika seseorang menggunakan kartu kredit orang lain untuk alasan pribadi sedangkan pemilik kartu dan penerbit kartu tidak menyadari bahwa kartu miliknya sedang digunakan. Selanjutnya, seseorang tersebut menggunakan kartu tanpa ada hubungannya dengan pemegang kartu atau penerbit, dan tidak memiliki niat baik untuk menghubungi pemilik kartu atau membuat pembayaran atas pembelian yang dilakukannya. Dalam hal ini pemilik atau pemegang kartu kredit tetap mendapatkan tagihan dari bank atas transaksi yang dilakukan oleh pelaku padahal

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. "*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*". Bandung. Penerbit Refika Aditama. Hal. 8

² Ibid

³ Tb. Irman, 2006. *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Penerbit PT. MQS Publishing, Bandung, hlm 154 - 164

transaksi tersebut dilakukan tanpa ijin ataupun sepengetahuan si pemilik kartu kredit.

Menurut Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 668/Pid.B/2012/PN.dps. Salah satu kasus *Credit card fraud* yang terjadi pada sekitar bulan Februari pada tahun 2012 yang berawal dari laporan nasabah BCA bernama Andre Andik Utama, Dyah Tri Wahyuningrum dan beberapa nasabah lainnya yang melakukan pengaduan ke customer service Halo BCA mengenai berkurang atau hilangnya uang mereka yang berada pada rekening mereka namun para nasabah tersebut merasa tidak melakukan transaksi apapun. Setelah mendengarkan aduan tersebut pihak BCA melacak dari mana transaksi itu berasal dan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian berdasarkan aduan dari pihak BCA ternyata diketahui pelaku bernama Teguh T Khasan dan kedua orang rekannya yang merupakan warga Negara Indonesia yang memperoleh data kartu kredit para korban melalui transaksi di sebuah restoran dan menggunakan mesin *card reader* yang ada pada kasir di restoran tersebut dengan cara menggesekan kartu milik korban 2 kali ke mesin tersebut dan setelah itu pelaku mencatat dengan kertas dan pulpen data pribadi pemegang kartu kredit yang muncul pada *card reader*.⁴

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang paling sering terlibat dalam kejahatan *Credit card fraud*. Dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk membahas bagaimana upaya pemerintah melindungi pengguna atau pemilik

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:688/Pid.B/2012/PN.Dps
.www.puktusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 10 agustus 2016

sebuah kartu kredit dari kejahatan *Credit Card Fraud* melalui produk - produk hukum yang ada di Indonesia

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia.?
2. Bagaimana Konstruksi perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dari ancaman kejahatan *credit card fraud*.?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dari ancaman terjadinya kejahatan *credit card fraud*.
2. Untuk mengetahui konstruksi perlindungan hukum yang baik bagi pemegang kartu kredit menurut hukum di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Penulisan yang dilakukan ini bertujuan serta diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi subjek sebagaimana di maksud dalam penelitian yaitu masyarakat yang khususnya adalah para pemegang kartu kredit dalam memahami bagaimana pemberian perlindungan hukum terkait kartu Kredit di Indonesia

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran bagi para pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan masyarakat luas mengenai efektifitas Kitab-Kitab Undang Pidana (KUHP), Undang -undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi

elektronik serta undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam memberikan perlindungan bagi pemegang kartu kredit dari terjadinya tindak pidana *credit card fraud*.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan berupa informasi, mengenai bagaimana hukum di Indonesia dapat melindungi para pemegang kartu kredit serta turut mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi di dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit bagi para pelaku dan memberi manfaat bagi masyarakat yang khususnya pemegang kartu kredit pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), dan mahasiswa di bidang ilmu hukum tentang upaya menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kartu kredit.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan untuk meningkatkan dan menyempurnakan produk – produk hukum di Indonesia terkait pengaturan mengenai kartu kredit yang merupakan objek dari penelitian ini dari ancaman kejahatan *Credit Card Fraud*.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berwawasan dalam memahami fungsi produk hukum di Indonesia beserta konstruksi hukumnya yang baik dalam menjamin kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang selama ini digunakan oleh masyarakat beserta

upaya dalam menanggulangi dan agar terhindar dari segala bentuk kejahatan Penyalahgunaan kartu kredit.

3. Bagi akademisi Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan hukum dalam bidang hukum dan perkembangannya dalam hal pemahaman produk hukum terkait kartu kredit.
4. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis tentang bagaimana produk hukum di Indonesia mengatasi permasalahan *Credit Card Fraud* dan bagaimana konstruksi hukum yang baik untuk melindungi para pemegang atau pemilik kartu kredit itu dari bentuk – bentuk kejahatan *Credit Card Fraud*.

F. Metode penulisan

a) Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang dilakukan dengan menganalisa pasal – pasal terkait yang ada di dalam produk – produk hukum di Indonesia terkait dengan kejahatan *Credit Card Fraud*. Yang diharapkan dapat memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antara produk – produk hukum yang ada di Indonesia terkait dengan Kejahatan *Credit card fraud* dan juga memberikan gambaran tentang konstruksi perlindungan hukum yang baik bagi pemegang kartu kredit.

b) Bahan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa data hukum sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang berupa peraturan perundang – undangan atau bahan hukum positif lainnya terkait, antara lain :
 - Undang – undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.
 - Kitab Undang – undang Hukum Perdata
 - Kitab Undang – undang Hukum Pidana
 - Peraturan Bank Indonesia No 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
 - Undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah sumber data pelengkap kedua yang diperoleh dari buku, jurnal dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas sehingga mendukung dari bahan hukum primer
- c. Bahan Hukum tersier adalah jenis data mengenai pengertian baku sebagai petunjuk bahan hukum primer dan tersier yaitu kamus dan ensiklopedia.

c) Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi pustaka

Penulis melakukan pengumpulan data yang terdapat dalam perundang-undangan, buku-buku, literatur, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

b. Internet

Penulis melakukan penelusuran melalui internet atau website untuk melengkapi data yang terkait dengan penelitian.

d) Analisa data

Seluruh data yang terkumpul baik primer, sekunder, maupun tersier dianalisa secara deskriptif kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana agar mencapai kejelasan atas masalah yang sedang diteliti untuk kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan tema permasalahan penelitian hukum

G. Sistematika penulisan

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang hal – hal yang melatar belakangi pemilihan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis dan sekaligus menjadi pengantar

umum di dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan landasan atau kajian teori tentang perlindungan hukum preventif dan represif serta dikaitkan dengan teori konstruksi hukum untuk kemudian digunakan menganalisa produk – produk hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi para pemegang kartu kredit serta dapat mendukung hasil dari penelitian yang didalamnya akan membahas permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis.

3. BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab III ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk pemilik kartu kredit oleh undang – undang dan konstruksi perlindungan hukum bagi para pemegang kartu kredit dari ancaman *credit card fraud*. Dalam pembahasan akan dikaitkan dengan kajian teori mengenai konstruksi hukum yang baik dengan menggunakan landasan yuridis yang tepat.

4. BAB IV : PENUTUP

Dalam bab IV ini yang merupakan bab terakhir atau penutup didalamnya berisikan kesimpulan dari hasil peneilitian hukum yang dilakukan penulis.